

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan terkait dengan latar belakang masalah yang ada dilapangan yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan tesis.

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Manusia makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia secara ekologis adalah bagian dari lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia bergantung pada keutuhan lingkungan hidupnya. Hal ini memberi arti bahwa keberadaan manusia di atas bumi sangat dipengaruhi oleh komponen lingkungan. Lingkungan sebagai tempat hidup mensyaratkan harus ada keserasian antara manusia dan lingkungannya.

Berita tentang terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air maupun tanah dengan segala aspek dapat dikatakan bahwa kerusakan lingkungan sudah merupakan bagian yang tidak dapat dihindarkan dari kegiatan pembangunan. Lingkungan yang tercemar akibat kegiatan manusia maupun proses alam akan berdampak negatif pada kesehatan, kenikmatan hidup, kemudahan, efisiensi, keindahan, serta keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam. Pencemaran yang ingin dibahas dalam penelitian ini tentang pencemaran air khususnya sungai yaitu Sungai Kapuas yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Bab I, Pasal I angka 1 menyatakan bahwa: “sungai adalah alur

atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan”.

Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang dan terbesar di Kalimantan Barat memiliki nilai dan fungsi strategis bagi masyarakatnya, serta mempunyai peran yang sangat besar dalam era pembangunan di Daerah Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan Sungai Kapuas melalui 8 Kabupaten/kota dari 14 daerah kabupaten/kota, yaitu Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu, yang merupakan sungai besar utama merupakan sungai terpanjang di Indonesia yaitu 1.086 km (DAS Kapuas ini memiliki luas *catchment* 98.249,10 Km²; yang memiliki 33 sungai induk dan 11 cabang).

Setiap hari manusia melakukan kegiatan tertentu, yang mana kegiatan tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran, khususnya pencemaran air. Adapun penyebab utama pencemaran air yaitu pencemaran air melalui limbah pabrik, dan limbah rumah tangga yang berupa zat kimia dari deterjen yang digunakan sehari-hari, serta zat-zat kimia yang dihasilkan dari kegiatan manusia lainnya. Hal ini tentu memberi dampak negatif terhadap lingkungan, bahkan pencemaran air tersebut dapat membunuh makhluk hidup sekitarnya. Tidak dapat dipungkiri, air memiliki peran yang sangat penting pula dalam proses dan membuang limbah yang berasal dari domestik dan perindustrian, tetapi pembuangan limbah padat atau cair ke perairan dapat menimbulkan pencemaran air. Pencemaran air dapat muncul dalam berbagai macam cara seperti limbah kotoran domestik, bahan kimia, deterjen adalah pencemaran yang umum dibuang ke perairan baik disengaja atau tidak disengaja, disamping itu juga dapat berupa limbah industri, yaitu sisa produksi yang berbentuk zat cair yang dibuang melalui pipa-pipa perusahaan ke saluran air umum. Akibat pencemaran air pada saluran air ini dapat menyebabkan kerusakan atau timbul penyakit bagi hewan serta tumbuhan air, termasuk manusia. Berikut ini diklasifikasikan pencemaran air di Kota Pontianak yang diuraikan pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1

Matriks Permasalahan Pencemaran Air di Kota Pontianak

No.	Lokasi Pemantauan	Parameter Pencemar	Hasil Pengukuran
1.	Air Parit Kecamatan Pontianak Utara (Air Parit Batas Kota, Air Sungai Kunyit, Air Parit Gg. Flora, Air Parit Sungai Sahang 1, Air Parit Sungai Sahang 2, Air Parit Sungai Sahang 3, Air Parit Sungai Sahang 4, Air Parit Pangeran, Air Parit Pekong, Air Parit Gg. Makmur, Air Parit Darma Putra di 2 (dua) titik, Air Parit Samping SMK 2)	<i>Total Suspended Solid (TSS), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrit (NO₂), Biological Oxygen Demand (BOD₅) dan Seng (Z_n)</i>	Semua Parameter pencemar yang diuji seperti tertulis pada kolom 3 semuanya telah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
2	Air Parit Kecamatan Pontianak Timur (Parit Mayor Batas Kota, Parit Kongsu Kampung Kapur, Parit Saigon Jl. Yusuf Karim, Park Yarsi Samarakai, Parit Jl. Perintis (samping Tol) Bagian Tanjung Raya II, Parit Jl. Perintis (samping Toll Bagian Tanjung Raya I, Parit Panglima A'im, Parit Tanjung Hulu, Parit Tanjung Hilir, Parit Bugis, Parit Jl. Keraton, Parit Tanjung Raya I, Tambelan Sampit).	<i>Total Dissolve Solid (TDS), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrit (NO₂), dan Biological Oxygen Demand (BOD₅).</i>	Semua Parameter pencemar yang diuji seperti tertulis pada kolom 3 semuanya telah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
3	Air Parit Kecamatan Pontianak Tenggara (pada Parit Jl. Soedarso Hilir (Batas Kota), Parit Jl. Soedarso Hulu (Batas Kota), Parit Jl. H. Husein 1, Parit Jl. H. Husein II, Parit Jl. Imam Bonjol (Kp.	<i>Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrit (NO₂), dan Biological Oxygen Demand (BOD₅).</i>	Semua Parameter pencemar yang diuji seperti tertulis pada kolom 3 semuanya telah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

	Bangka), Parit Jl. Sepakat).		
4	Air Parit Kecamatan Pontianak Selatan (Parit Tokaya disamping Ramayana Mall, Parit Tokaya Jl. Gajah Mada, Parit Tokaya Jl. A. Yani, Parit Tokaya Jl. Purnama, Parit Jl. Media).	<i>Chemical Oxigen Demand (COD), Nitrit (NO₂), Biological Oxigen Demand (BOD₅) dan Seng (Zn)</i>	Semua Parameter pencemar yang diuji seperti tertulis pada kolom 3 semuanya telah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
5	Air Parit Kecamatan Pontianak Kota (Lokasi sampling berada pada Air Parit Sungai Jawi (Gertak I), Air Parit Jl. Rajawali, Air Parit Jl. Nusa Indah di samping Kantor Garuda, Air Parit Jl. Zainuddin di samping kantor bea cukai, Air Parit Jl. Merdeka Gg. Kasuari, Air Parit Jl. Diponegoro, Air Parit Jl. Ampera, Air Parit Jl. Aliyang, Air Parit Jl. Gusti Hamzah (Hilir).	<i>Chemical Oxigen Demand (COD), dan Biological Oxigen Demand (BOD₅)</i>	Semua Parameter pencemar yang diuji seperti tertulis pada kolom 3 semuanya telah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
6	Air Parit Kecamatan Pontianak Barat (Air Parit Nipah Kuning (Batas Kota), Air Parit Jl. Karet, Air Parit Sungai Landak, Air Parit Sungai Beliang, Air Parit Gang Timun, Air Parit Gang Pisang, Air Parit Gang Jambu, Air Parit Gang Jagung, Air Parit Gang Srikaya, Air Parit Gang Tamang, Air Parit Gang Blitar, Air Parit Jl. Tebu).	<i>Chemical Oxigen Demand (COD), Nitrit (NO₂), dan Biological Oxigen Demand (BOD₅)</i>	Semua Parameter pencemar yang diuji seperti tertulis pada kolom 3 semuanya telah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
7	Air Sungai Kapuas	<i>Total Suspended Solid (TSS), Chemical Oxigen Demand (COD), Nitrit (NO₂), Biological Oxigen Demand (BOD₅) dan</i>	Semua Parameter pencemar yang diuji seperti tertulis pada kolom 3 semuanya telah melebihi baku

		<i>Tembaga (Cu)</i>	mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
8	Air Sungai Landak	<i>Total Suspended Solid (TSS), Chemical Oxygen Demand (COD), Seng (Zn), Biological Oxygen Demand (BOD₅) dan Tembaga (Cu)</i>	Semua Parameter pencemar yang diuji seperti tertulis pada kolom 3 semuanya telah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

Sumber: BLH Kota Pontianak, 2012

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sungai/parit yang ada di Kota Pontianak, pada umumnya sudah tercemar. Hasil pemantauan pada 12 titik sampling di Sungai Kapuas Kota Pontianak, menunjukkan untuk parameter TSS, COD, Nitrit, BOD telah melebihi baku mutu air kelas II. Sedangkan untuk Sungai Landak pada 6 titik pemantauan menunjukkan TSS, COD, Nitrit dan BOD melebihi baku mutu air kelas II bahkan kadang-kadang berada di kelas III, IV.

Mengingat Sungai Kapuas sangat berpotensi baik untuk wisata maupun untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sangat disayangkan jika kenyataannya sungai ini telah tercemar. Selain itu, merkuri yang ada tertimbun dalam sungai jika masuk ke tubuh manusia bisa mengganggu sistem saraf dan sistem enzim yang berguna bagi metabolisme tubuh. Dampak pada manusia: menderita tumor, hilang ingatan, mengganggu pertumbuhan janin.

Masalah pencemaran Sungai Kapuas termasuk masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan politik warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial". Soekanto (2007: 312). Adapun yang termasuk masalah sosial menurut Soekanto (2007: 346) menyatakan ada beberapa masalah sosial yang penting yaitu:

- a. kemiskinan, sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut;

- b. kejahatan;
- c. disorganisasi keluarga, yaitu suatu perpecahan dalam keluarga sebagai unit, oleh karena anggota-anggota keluarga tersebut gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya;
- d. masalah generasi muda;
- e. peperangan;
- f. pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat;
- g. masalah kependudukan;
- h. masalah lingkungan;
- i. birokrasi.

Pencemaran lingkungan terjadi karena kurangnya tanggung jawab dari masyarakat yang dalam hal ini sebagai warga negara dari suatu negara. Oleh sebab itu setiap warga negara bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan disekitarnya. Tanggung jawab ini bukan hanya dibebankan pada pemerintah daerah namun juga dipikul oleh setiap warga negara atau masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai Bab I, Pasal I angka 10 menyatakan bahwa: “masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan”. Melalui lembaga atau organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan pembinaan tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat disekitarnya.

Pembinaan tanggung jawab warga negara dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk membentuk kepribadian warga negara. Melalui pendidikan diharapkan terjadi proses pendewasaan, baik dewasa dalam pola pikir maupun dewasa dalam perilaku. Selain itu, pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses bimbingan dan pembelajaran bagi individu, agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berkhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Hal ini senada dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pada Bab II, Pasal 3 dinyatakan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta **bertanggung jawab**.

Dari kutipan diatas dapat dimaknai bahwa melalui pendidikanlah kemampuan dan watak suatu bangsa dapat dibentuk sehingga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya melalui pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, tetapi, juga melalui pendidikan informal dan non formal yang memiliki peran yang sama penting untuk membentuk kepribadian warga negara. Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Dikatakan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan nonformal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatannya dapat dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Kalau diperhatikan ketiga jenis pendidikan diatas, ada kecenderungan bahwa pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal selama ini berjalan terpisah satu dengan lainnya. Mereka tidak saling mendukung untuk peningkatan pembentukan kepribadian peserta didik. Setiap lembaga pendidikan tersebut berjalan masing-masing sehingga terjadi sekarang adalah pembentukan pribadi peserta didik menjadi parsial, misalnya anak bersikap baik di rumah, namun ketika keluar rumah atau berada di sekolah ia melakukan perkelahian antarpelajar, memiliki 'ketertarikan' bergaul dengan WTS atau melakukan

perampokan. Sikap-sikap ini merupakan bagian dari penyimpangan moralitas dan perilaku sosial pelajar (Suyanto dan Hisyam, 2000: 194)

Pembinaan tanggung jawab sangat penting dilakukan, karena tanggung jawab merupakan salah satu nilai dari karakter. Selain itu tanggung jawab juga merupakan tujuan dari diberikannya Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yaitu membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Tujuan dari negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Wahab dan Sapriya, 2011: 99).

Upaya untuk menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebenarnya sudah lama dan banyak dilakukan, terutama di dunia persekolahan dengan ujung tombaknya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*). Winataputra dan Budimansyah (2012:211) memandang tiga domain yang ada dalam PKn yaitu domain kurikuler, domain sosiokultural, dan domain kajian ilmiah, sebagaimana dikemukakannya bahwa :

Dalam spektrum yang lebih luas PKn sebagai *Citizenship Education* memiliki tiga domain, yakni domain kurikuler (PKn sebagai mata pelajaran di sekolah), domain sosiokultural (PKn yang berkembang di masyarakat oleh LSM, media massa, maupun gerakan *civil society* lainnya), dan domain kajian ilmiah (kegiatan penelitian dan pengembangan program-program pendidikan kewarganegaraan).

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk warga negara yang cerdas dan baik maka Pendidikan Kewarganegaraan harus diterapkan ke dalam tiga domain, karena ketiga domain itu saling keterkaitan satu sama lainnya. Dalam penelitian ini dibahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai domain sosio kultural. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dimensi

sosial kultural pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek tujuan, pengorganisasian kurikulum dan materi pembelajaran. Perbedaan terutama pada aspek sasaran, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Program PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah (Rahmat dkk, 2009: 9).

Ada dua istilah yang digunakan dalam pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut kepustakaan asing yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (dalam arti *civic education*) dan Pendidikan Kewarganegaraan (dalam arti *citizenship education*). Kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda namun tujuannya sama yaitu untuk menjadikan warga negara yang cerdas dan baik.

Gagasan ini sesuai dengan pendapat Cogan (1999: 4) yang menyatakan bahwa:

“Civic education, ... the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult life. “Citizenship Education or Education for Citizenship”, ... both these in school experiences as well as out of school or non formal an formal learning which takes place in the family, the religious organization. Community organizations, the media. Etc which help to shape the totally of the citizens”.

Hal ini dapat dimaknai bahwa “*civic education*” merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warga negara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, setelah mereka dewasa. *Civic education* merupakan mata pelajaran di sekolah, kalau di Indonesia mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* merupakan istilah yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan dan dalam media dan lain sebagainya yang berperan membantu proses pembentukan

totalitas atau keutuhan sebagai warga negara. *Citizenship education* atau *education for citizenship* merupakan suatu konsep yang lebih luas dibandingkan *civic education*, namun *civic education* merupakan bagian penting di dalamnya. Dengan kata lain *civic education* sebagai Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan formal yang menerima dampak pengiring dari berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. *Citizenship education* atau *education for citizenship* berlangsung dalam pendidikan nonformal atau informal yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat, kalau di masyarakat dilakukan oleh LSM, media massa, maupun gerakan *civil society* lainnya.

Dari beberapa gagasan diatas maka melalui Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan terbentuklah warga negara yang baik, yang memiliki karakter serta menjadi manusia yang beriman dan berilmu atau dengan kata lain menjadi manusia seutuhnya yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Realitanya pembangunan karakter yang dilakukan selama ini melalui pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan belum berhasil mencapai harapan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sapriya (2007:5) yang menyatakan bahwa: ”upaya pembangunan karakter bangsa melalui PKn sebagai mata pelajaran di sekolah yang telah lama berlangsung sejak lama itu belumlah optimal dan belum berhasil mencapai harapan, bahkan hingga saat ini program pendidikan ini malah dipertanyakan keberadaan dan perannya”. Pada kenyataannya banyak hal yang sudah dilakukan di sekolah, baik dari segi memperbaiki metode mengajar guru, media, maupun sumber belajar, namun belum berhasil secara maksimal. Hal ini menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan belum dilakukannya secara sinerginitas antara Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan formal, Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan nonformal dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan informal. Seperti yang dikatakan oleh Budimansyah (2010:145-146) yang menyatakan bahwa:

Untuk membangun karakter bangsa, PKn harus memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota

organisasi sosial dan organisasi politik. Ketiga peran tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Dengan demikian untuk membentuk karakter atau warga negara yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pendidikan formal saja tetapi perlu dilakukan secara berkesinambungan antara pendidikan formal, nonformal dan informal.

Hal tersebut senada dengan pendapat Kerr (1999: 17) yang menyatakan bahwa:

Citizenship or civic education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process atau. "citizenship or civic education" atau PKn dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Dari gagasan tersebut dapat dimaknai bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam membina warga negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik PKn dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal maupun nonformal.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Cogan (1998: 13) yang menyatakan bahwa:

"...formal, meaning primary schooling; non-formal, meaning educational programmes which are outside the context of formal schooling, e.g, adult and continuing education programmes, special education for children and youth, etc, and informal, which consist of those learning acquired almost unconsciously in a variety of settings both in school and in the wider community." Pendidikan Kewarganegaraan bisa dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Megawangi (2004) yang menyatakan bahwa "usaha membentuk karakter yang baik bukan pekerjaan mudah, memerlukan pendekatan komprehensif yang dilakukan secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan yang dimulai dari sejak kecil di lingkungan

keluarga dan masyarakat. Di Indonesia pendidikan karakter di lingkungan masyarakat tidak menjadi prioritas negara. Dimana Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ujung tombaknya, namun masih ditekankan pada lingkungan persekolahan saja. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk menciptakan negara yang baik (berkarakter) harus dilakukan melalui pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dari sejak dini oleh berbagai pihak, sekolah maupun pihak masyarakat termasuk keluarga. Banyak ditemukan bahwa banyak kenyataan di lapangan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan melalui pendidikan di persekolahan dengan dunia nyata yang ada di masyarakat. Pembangunan karakter tidak akan berhasil jika tidak dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kardiman (2008: 268) yang menyatakan bahwa:

Pembangunan karakter bangsa tidak saja menjadi tanggung jawab dunia persekolahan tetapi juga menjadi tanggung jawab situ-situs kewarganegaraan di luar persekolahan. Hal ini menegaskan bahwa PKn yang di mana di dalamnya terdapat pendidikan karakter, tidak hanya menjadi mata pelajaran persekolahan, tetapi menjadi PKn di lingkungan masyarakat (*community civic education*).

Untuk itulah selain upaya yang terus menerus pengembangan karakter di lingkungan persekolahan dengan pengembangan konsep dan metodologi juga tidak kalah pentingnya pengembangan karakter bangsa di lingkungan masyarakat (*community civics*) sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam rangka menciptakan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

Menurut peneliti masalah pembinaan tanggung jawab warga negara dan menumbuhkan rasa peduli pada lingkungan merupakan salah satu tugas PKn khususnya PKn sebagai domain sosial kultural atau Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat (*community civics*). Atas pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Pembinaan Tanggung Jawab Warga Negara dalam Memecahkan Masalah-Masalah Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Community Civics*)**”. Adapun *community civics* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (LSM WALHI).

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka secara umum rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah Pembinaan Tanggung Jawab Warga Negara dalam Memecahkan Masalah-Masalah Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*)”. Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fenomena nyata tentang tanggung jawab warga negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*) bagi pemecahan masalah sosial?
2. Bagaimanakah kemandirian masyarakat melalui peran Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*) dalam membina tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah sosial?
3. Langkah-langkah apa sajakah yang dapat dilakukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*) untuk melakukan pembinaan tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah sosial?
4. Bagaimanakah peran organisasi sosial lainnya dalam membina tanggung jawab warga negara secara bersama-sama dalam memecahkan masalah sosial?
5. Bagaimanakah efektifitas hasil pembinaan tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah dalam penelitian maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan melakukan pengkajian, menggali, menganalisis tentang pembinaan tanggung jawab

warga negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*).

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

- a. Fenomena nyata tentang tanggung jawab warga negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*) bagi pemecahan masalah sosial.
- b. Sikap kemandirian masyarakat melalui peran Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*) dalam membina tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah sosial.
- c. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*) untuk melakukan pembinaan tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah sosial.
- d. Peran organisasi sosial lainnya dalam membina tanggung jawab warga negara secara bersama-sama dalam memecahkan masalah sosial.
- e. Efektifitas hasil pembinaan tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoritis) maupun secara empirik (praktis) bagi pembinaan tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*).

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pembinaan tanggung jawab warga negara dalam memecahkan masalah-masalah sosial

melalui Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*community civics*) dalam menangani pencemaran Sungai Kapuas Kota Pontianak Kalimantan Barat.

2. Manfaat Praktis

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi Sekolah, diharapkan setiap sekolah dapat memasukkan materi tentang lingkungan hidup ke dalam kurikulum khususnya mata pelajaran muatan lokal.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan khususnya sungai semakin meningkat sehingga dapat menjadi warga negara yang baik.
- c. Bagi para akademis atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, hendaknya dalam melaksanakan tugas tidak hanya fokus pada pendidikan di sekolah tetapi pendidikan di masyarakat juga perlu ditingkatkan.
- d. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas yang berkaitan dengan lingkungan, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat membuat peraturan dan sanksi yang tegas agar masyarakat sadar akan kelestarian lingkungan khususnya sungai Kapuas.
- e. Bagi peneliti, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah inspirasi bagi peneliti pendidikan kewarganegaraan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan tanggung jawab sosial pada lingkungan atau komunitas lainnya.

E. Struktur Organisasi Penulisan

Tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni: bab I tentang pendahuluan, bab II tentang tinjauan pustaka, bab III tentang metode penelitian, bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan serta bab V tentang kesimpulan dan rekomendasi. Untuk lebih jelasnya, pembahasan dari kelima bab ini secara singkat dijelaskan dibawah ini.

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini secara rinci mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab II tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: (1) manusia dan lingkungan, (2) masalah-masalah sosial yang diakibatkan oleh aliran Sungai Kapuas, (3) hakikat, pengertian dan tujuan PKn, (4) pembinaan tanggung jawab warga negara, (5) Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan (*Community Civics*), (6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (7) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan (8) hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan temuan penelitian serta tahap-tahap pelaksanaan penelitian di lapangan.

Bab IV membahas tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu: (1) kesimpulan dan (2) rekomendasi.